



TEORI BIROKRASI WEBER

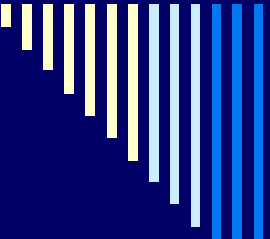
Kuliah Minggu ke-5 dan 6

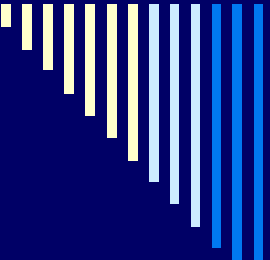
1. Prinsip pemikiran Max Weber
2. Lima Keyakinan Dasar dlm Otoritas Legal
3. 8 Dalil Otoritas Legal
4. Batasan bagi Staf Administrasi
5. Beda Weber dgn Ahli yg Lain ttg Birokrasi
6. Pencegahan Penyalahgunaan Otoritas
7. Kritik thdp Teori Biro Weber



01. Prinsip Pemikiran Max Weber

- Birokrasi rasional adalah sebuah konsepsi birokrasi yg muncul atas dasar kaidah-kaidah otoritas hukum, bukan krn sebab lain, seperti otoritas tradisional maupun otoritas kharismatis.
- Weber (1922) membedakan tiga tipe otoritas:
 - **Otoritas Tradisional**, bertumpu pd kepercayaan dan rasa hormat pd tradisi dan orang-orang yg mengemban pelaksanaan tradisi tsb. Dlm otoritas ini seseorg taat dan tunduk pd org lain krn mrk percaya bahwa tradisi memang mengharuskan mrk berbuat demikian, tanpa perlu melakukan critical analysis thdp kenyataan itu. Pemimpin memperoleh hak-hak istimewa scr otomatis, dan tdk membutuhkan legalitas formal dr pengikutnya. Contoh: pemimpin agama, pemimpin sekte ttt, dsb.

- 
- **Otoritas Kharismatis**, bertumpu pd keyakinan thdp pengabdian, kepahlawanan, jasa dan kemampuan luar biasa dari ssorg.
 - Dlm otoritas ini, ssorg taat dan patuh pd org lain krn ia dipercaya memiliki kelebihan khusus yg tdk dimiliki org lain.
 - Ketaatan bersifat mutlak, artinya apapun yg diperintahkan pemimpin akan diikuti pengikutnya. Sifat ketaatan tsb emosional.

- 
- **Otoritas Legal**, berdasarkan keyakinan akan aturan hukum yg diciptakan scr rasional dan juga pd kewenangan ssorg yg melaksanakan aturan hukum itu sesuai prosedur yg ditetapkan.

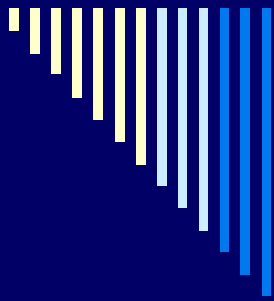
Dlm otoritas ini, ssorg taat pd org lain krn memang hukum menentukan demikian dan dia terikat pd ketentuan hukum itu. Ketaatan bersifat impersonal, tdk berkenaan dgn pribadi.

- Menurut Weber, tdk ada bentuk murni dari ketiga tipe ideal yg teraplikasikan dlm sejarah. Yg ada adlh campuran dari dua atau ketiganya, dgn salah satu tipe cenderung dominan.



- Hartmann dan Parsons menambahkan adanya tipe keempat, yakni **otoritas fungsional** atau **otoritas profesional**. Didasarkan atas keyakinan akan keahlian atau pengetahuan dan kejujuran ssorg.

Org taat dan tunduk di bawah subordinasi pemegang otoritas (pemimpin) krn dia dipercaya memiliki keahlian profesi yg mumpuni.



Otoritas Legal Sebagai Dasar Birokrasi Rasional

- Birokrasi rasional adalah lembaga birokrasi yg didasarkan pd norma-norma yg tercipta scr sadar dan rasional menurut tertib hukum serta berfungsi sesuai dgn tujuan dan sarana yg ada.



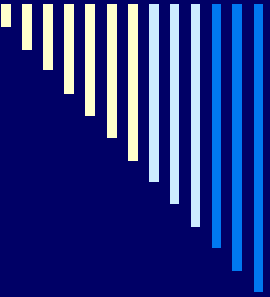
02. Agar tercipta otoritas legal, Weber menguraikan lima keyakinan dasar, yaitu:

1. UU atau peraturan yg dpt diciptakan, dan menuntut kepatuhan dr anggota masy atau anggota organ.;
2. Hukum adalah sistem aturan yg abstrak, utk dpt melaksanakannya diperlukan adm yg mengurus aturan itu dlm batasan hukum;
3. Org yg menjlnkn otoritas itu hrs mentaati tatanan yg impersonal;
4. Orang mentaati hukum adalah krn mereka sebagai anggota komunitas/organisasi bukan krn sebab lain;
5. Ketaatn bukn kpd pribadi org yg memegang otoritas, melainkan kpd tatanan hukum yg impersonal yg tlh membrikn wewenang kpd org tsb.



03. Weber merumuskan 8 dalil otoritas legal, yaitu:

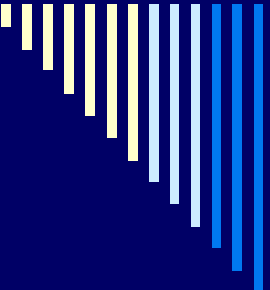
1. tugas pejabat diorganisir atas dasar yg diatur dan berkelanjutan;
2. tugas dibagi dlm tahap yg berbeda dari segi fungsional yg masing-masing dilengkapi kewenangan (otoritas) dan sanksi yg sesuai dgn tingkatannya;
3. jabatan-jabatan diatur scr hierarkis;
4. aturan-aturan yg mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis maupun legal;

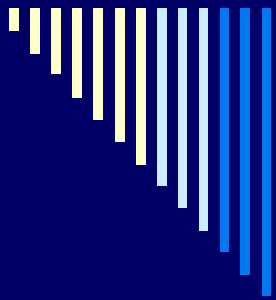
- 
5. sumber-sumber institusi (fasilitas, kewenangan) dibedakan dgn sumber-sumber individu;
 6. pemegang jabatan tdk dpt mengambil jabatannya sebagai milik pribadi;
 7. administrasi didasarkan atas dokumen tertulis;
 8. sistem kekuasaan legal (*legal authority*) dpt memiliki banyak bentuk, bentuk yg paling murni adalah staf administratif birokratis.



04. Batasan-batasan bagi Staf Administrasi

1. Staf administrasi bebas, hanya menjlnkn tugas impersonal dlm jabatannya. Hanya melakukan pekerjaan sesuai dgn *job-description* dan tdk dpt diperintah di luar bidang tugasnya;
2. Terdapat hierarki jabatan yg jelas. Pd tiap hierarki melekat tugas, tanggung jawab, dan kewenangan;
3. Fungsi-fungsi jabatan dirinci dgn jelas. Ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yg jelas dan rinci;
4. Para pejabat diangkat atas dasar kontrak. Jadi ada pembatasan periodeisasi dan evaluasi masa jabatan;
5. Para pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi personal, atas dasar merit sistem.

- 
6. Para pejabat digaji dgn uang dan dibri pensiun sesuai kedudukan mereka dlm hierarki;
 7. Pekerjaan pejabat adalah pekerjaan satu-satunya yg utama. Dengan demikian tdk boleh rangkap jabatan, baik dlm institusi publik maupun private;
 8. Ada struktur karir yg memungkinkan kenaikan pangkat, baik melalui senioritas, prestasi, atau penilaian lain sesuai kebutuhan atasan.



9. Pejabat tdk boleh mengambil kedudukannya sebagai milik pribadi, demikian pula sumber-sumber yg melekat pd jabatannya itu (fasilitas, anggaran, dan wewenang). Dengan demikian hrs ada impersonalitas jabatan (pemisahan urusan pribadi dan dinas) dlm birokrasi;
10. Pejabat tunduk pd suatu pengendalian yg dipersatukan oleh sistem yg disipliner.



05. Beda Weber dgn Penulis Lain

1. Birokratisme dan inefisiensi bkn isu utama;
2. Biro bkn pemerntn oleh pejabat krn pejabat buknlh biro itu sendiri;
3. Analisis ttg biro tdk hrs dikaitkn dgn demokrasi; sifat khusus adm modern dan pengawsn aparat negara adlh dua hal yg berbeda



06. PENCEGAHAN Penyalahgunaan Otoritas

- (1) Kolegial. Pengambiln kptsn bersama;
- (2) Pemisahn Kekuasaan. Pembagian tanggungjawab;
- (3) Adm.profesional. Pejbt prof digaji, lingkup kerja dan otoritas jels;
- (4) Demokrasi lagsung. Menjamin legitimasi dan tanggungjwb melayani;
- (5) Representasi (perwakilan). Badan perwakilan kolegial



07. KRITIK THDP BIROKRASI LEGAL-RASIONAL WEBER (1)

- (1) Tdk manusiawi: hancurkn emosi dan perasaan;
- (2) Tekanan pd ketepatan dan keajegan (reliabilitas) dlm adm, dpt mengakibatkan kegagalan adm itu sendiri. Peraturan yg disusun sbg alat dpt menjadi tujuan itu sendiri;
- (3) Norma impersonal dpt merusak hubungan pribadi antara pejabat dan masyarakat



07. KRITIK THDP BIROKRASI LEGAL-RASIONAL WEBER (2)

- (4) Jk posisi ditempti olh org yg tdk cocok dpt timbul konflik, krn tdk jels siapa yg hrs ditaati: pemegang otorits atau tenaga ahli;
- (5) Ketaatn thdp peratur: ada yg taat, ada yg tdk → pengaruhi kinerja;
- (6) Sult beradaptasi dgn perubhn krn terikt peratur.

Wis yo suwun
Sesuai bayaran
ee

